

**KERJA SAMA INDONESIA-BELANDA TAHUN 2019-2021**  
**STUDI KASUS: IMPLEMENTASI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)**  
**JOINT PRODUCTION ON SUSTAINABLE PALM OIL**

**Oleh : Revni Rahayu**

**(Email : [revnirahayu16@gmail.com](mailto:revnirahayu16@gmail.com))**

**Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel**

**(Email : [yolivia28@gmail.com](mailto:yolivia28@gmail.com))**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*This study aims to explain the implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) Joint Production on Sustainable Palm Oil between Indonesia and Netherlands during the period 2019 to 2021. This cooperation is based on the fact that the European Union is trying to block Indonesian Crude Palm Oil (CPO) into Europe. In fact, Indonesia is the world's largest exporter which has many interests in this sector.*

*This research is a qualitative research in the form of descriptive analysis. The data collection technique used is document analysis, by collecting data in the form of secondary data. Secondary data are documents consist of books, articles, journals, press releases, and various other public records. This study uses the theory of international cooperation as an analytical tool to explain the implementation of the memorandum of understanding between Indonesia and the Netherlands.*

*This research shows that Indonesia and the Netherlands formed the Bilateral Economic Commission as a forum for dialogue to make technical arrangements regarding the continuation of their cooperation. The National Initiatives for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders (NI-SCOPS) is a form of support from the Dutch government for Indonesia with the aim that Indonesian oil palm farmers meet sustainability standards in their production practices, while also contributing to efforts to reduce carbon gas emissions in accordance with the spirit of improvement environment.*

**Keyword : MoU, bilateral cooperation, crude palm oil, Joint Production on Sustainable Palm Oil**

## PENDAHULUAN

Produksi minyak sawit dunia saat ini didominasi oleh Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini menghasilkan sekitar 85-90% dari total produksi minyak sawit dunia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah total luas area perkebunan sawit Indonesia pada tahun 2017 mencapai hampir tiga kali lipat dari luas area pada tahun 2000. Minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) adalah salah satu minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Hal ini dikarenakan CPO secara harga relatif murah, mudah diproduksi dan sangat stabil yang dapat digunakan untuk berbagai jenis makanan, produk kebersihan, serta juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber biofuel atau biodiesel.<sup>1</sup>

Industri perkebunan dan pengolahan sawit adalah industri kunci bagi perekonomian Indonesia, sektor ini merupakan penghasil devisa yang penting dan memberikan kesempatan kerja bagi jutaan orang. Di sektor pertanian, minyak sawit menyumbang 1,5 hingga 2,5 persen terhadap total produk domestik bruto (PDB).<sup>2</sup> Namun, karena adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit oleh negara-negara Uni Eropa (UE) menyebabkan nilai ekspor Indonesia ke beberapa negara UE mengalami penurunan selama tahun 2019. Secara keseluruhan, nilai ekspor Indonesia ke Eropa pada periode Januari-September defisit yang cukup tajam, turun hingga 27,89 persen menjadi US\$ 1,72 miliar.<sup>3</sup>

Pada 26 September 2019, Pemerintah Indonesia dan Belanda

menandatangani nota kesepahaman yakni *Joint Production on Sustainable Palm Oil* di tengah perhelatan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74 di New York, Amerika Serikat (AS). Perjanjian ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda. Nota kesepahaman (MoU) tentang *Joint Production on Sustainable Palm Oil* tersebut ditujukan untuk mendukung upaya penguatan kapasitas petani skala kecil Indonesia dalam memenuhi sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).<sup>4</sup>

Bagi Indonesia, kerjasama dengan Belanda tersebut dapat memberikan nilai tambah guna meningkatkan daya saing CPO asal Indonesia di pasar global. Hal ini penting dilakukan agar CPO Indonesia dapat diterima secara luas, khususnya pasar CPO Eropa yang sangat gencar menyerang CPO dengan isu lingkungan. Dengan kesepakatan tersebut, diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan petani Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Berperan sebagai mitra andalan Indonesia dari UE, Belanda berkomitmen untuk membantu Indonesia dalam upaya sertifikasi produk kelapa sawit yang akan dipasarkan ke Negeri Kincir Angin, dan secara luas di pasar Eropa. Komitmen itu datang disaat komoditas ekspor andalan Indonesia tersebut diserang dengan berbagai kampanye negatif dan perlakuan diskriminasi dari organisasi multilateral Benua Biru. Sertifikasi produk minyak kelapa sawit tersebut nantinya akan menjadikan proses produksi dan produk kelapa sawit Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan (*sustainability*), ramah

---

<sup>1</sup> Indonesia-Investment, "Minyak Kelapa Sawit," Juni 2017, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>

<sup>2</sup>*Ibid*

<sup>3</sup>Databoks.katadata.co.id, "Ekspor Minyak Sawit ke Eropa Januari-September 2019 Menyusut 12%," November 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/06/ekspor-minyak-sawit-ke-eropa-januari-september-2019-menyusut-12>

---

<sup>4</sup>Bisnis.com, "Indonesia dan Belanda Teken Kerja Sama Sawit Berkelanjutan," September 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190927/12/1153106/indonesia-dan-belanda-teken-kerja-sama-sawit-berkelanjutan>

lingkungan, dan mampu bersaing dengan produk biofuel Eropa lainnya.<sup>5</sup>

## KERANGKA TEORI

### a. Perspektif Liberalisme

Perspektif ini mengedepankan pandangan tentang dunia berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Pertama, sifat manusia pada dasarnya baik dan karenanya manusia mempunyai kemampuan untuk berbagi dan bekerja sama. Kedua, perhatian manusia terhadap kesejahteraan sesama menjadikan kemajuan itu dimungkinkan. Ketiga, perilaku buruk manusia seperti halnya kekerasan, bukanlah karena cacatnya manusia tetapi karena buruknya institusi yang mendorong manusia untuk bertindak saling menyakiti. Keempat, perang dapat dihindari dan frekuensinya dapat dikurangi dengan menghilangkan pengaturan kelembagaan yang memicu terjadinya perang. Kelima, perang adalah permasalahan internasional yang membutuhkan upaya bersama atau multilateral daripada upaya nasional untuk mengendalikannya. Keenam, masyarakat internasional harus mengorganisir diri untuk menghilangkan institusi yang menyebabkan potensi perang, dan negara-negara juga harus mereformasi sistem politiknya sehingga hak penentuan nasib-sendiri dan praktek pemerintahan yang demokratis dapat membantu mendamaikan hubungan antar-negara.<sup>6</sup>

### b. Level Analisa

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan level analisa berupa level analisa organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan sebuah struktur

---

<sup>5</sup>Liputan6.com, "Belanda Bakal Bantu Upaya Sertifikasi Sawit Indonesia untuk Ekspor ke Pasar Eropa", Oktober 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/4081076/belanda-bakal-bantu-upaya-sertifikasi-sawit-indonesia-untuk-ekspor-ke-pasar-eropa>

<sup>6</sup>Vinsensio Dugis, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, (Surabaya: Cakra Studi Global Strategi,2016), hlm. 62-63

yang bersifat formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara anggota pemerintah dengan non-pemerintah dari dua ataupun lebih negara yang berdaulat dalam mencapai dan mengejar tujuan serta kepentingan yang sama untuk anggotanya. 27 Organisasi internasional ini terbagi dalam dua kategori yaitu Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization/NGO*) dan Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*International Non-Governmental Organization/INGO*). Beberapa contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*PBB/United Nation*), *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), *International Monetary Federation* (IMF), *Greenpeace*, dan *International Committee Of The Red Cross* (ICRC). Organisasi-organisasi ini terdiri dari beberapa kelompok swasta dalam bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya.

Penelitian ini berfokus pada kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Belanda. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis menggunakan tingkat analisis sistem dalam penelitian ini. Tingkat analisis sistem disebut tingkat analisis paling komprehensif di antara tingkat analisis yang tersedia karena dapat memberikan pola umum perilaku keadaan dan tingkat saling ketergantungan di antara mereka. Singkatnya, level analisi ini mengharuskan peneliti untuk memahami bagaimana bentuk dari sistem internasional dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi tindakan aktor.<sup>7</sup>

### c. Teori Kerjasama Internasional

Robert Keohane, mendefinisikan kerja sama terjadi "ketika aktor menyesuaikan perilaku mereka terhadap aktor lain atau mengantisipasi kebijakan yang diambil pihak lain melalui proses koordinasi kebijakan." Konsep kerja sama ini terdiri dari dua elemen penting.

---

<sup>7</sup>Yessi Olivia, "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional* vol. 5, no. 1 (Juli 2013), hlm. 898

Pertama, asumsinya adalah bahwa perilaku setiap aktor/negara didasari oleh beberapa tujuan bersama. Kedua, kerja samajuga menawarkan para pihak berupa keuntungan atau imbalan. Keuntungan yang didapatkan setiap negara yang bekerja sama tidak akan sama besarnya, tapi satu hal yang pasti kerja sama ini tetap saling menguntungkan.<sup>8</sup>

Mendefinisikan apa yang bukan termasuk dalam konsep kerja sama juga penting. Lawan dari kerja sama adalah kompetisi atau konflik, menyiratkan perilaku yang berusaha untuk mengurangi kemungkinan keuntungan yang akan didapat aktor lain atau perilaku yang bertujuan untuk menghambat keinginan mereka. Tidak hanya itu, tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakan/kebijakannya terhadap aktor lain juga dapat dianggap sebagai bentuk tindakan *uncooperative* (tidak bekerja sama). Meskipun perilaku tersebut mungkin tidak berusaha untuk mengurangi keuntungan bagi orang lain, namun tindakannya dapat dianggap tidak kooperatif. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai kerjasama tergantung pada dua elemen yang disebutkan di atas: perilaku yang diarahkan pada tujuan yang memerlukan penyesuaian kebijakan bersama sehingga semua pihak berakhir lebih baik daripada yang seharusnya.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana kerja sama antara Indonesia dan Belanda selama tahun 2019 - 2021 untuk mengimplementasikan nota kesepahaman *Joint Production on Sustainable Palm Oil*. Fokus kerja sama ini akan mengulas seputar bagaimana upaya Indonesia meningkatkan dan memperbaiki kualitas produksi minyak sawitnya agar diterima secara luas di pasar global, khususnya

Eropa. Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) adalah mekanisme yang ditempuh Indonesia dalam menghadapi kampanye negatif Uni Eropa terhadap CPO asal Indonesia.

### Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)

Hambatan dagang yang dilakukan oleh Eropa atas CPO telah merugikan Indonesia sebagai negara eksportir terbesar dunia. Terbaru di akhir tahun 2019, Uni Eropa secara sepihak menetapkan tarif bea masuk sebesar 8 hingga 18 persen terhadap biodiesel asal Indonesia untuk periode lima tahun kedepan. Perubahan tarif ini didasari alasan bahwa perusahaan biodiesel asal Indonesia menerima subsidi secara berlebihan dari pemerintah Eropa.<sup>10</sup> Meski demikian, langkah ini tampaknya hanya sebagai perpanjangan skenario dari UE untuk menghambat biodiesel asal Indonesia. Bersama Malaysia, Filipina dan Kolumbia, Indonesia terus melakukan perlawanan guna protes dan menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Uni Eropa yang membatasi bahkan berupaya untuk menghentikan produk sawit dunia ini.

Kecenderungan diskriminatif atas produk sawit Indonesia oleh Uni Eropa dirasa sangat merugikan. Pasalnya, selain berperan sebagai penyumbang devisa negara melalui kegiatannya, industri minyak sawit juga berperan besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani di berbagai daerah. Dari total luas lahan kelapa sawit 11,26 juta hektar, sebanyak 41 persennya dikelola oleh 2,3 juta rakyat kecil. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup produsen kelapa sawit tercermin dari kemampuannya untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada

---

<sup>8</sup>Helen Milner, "International Theories of Cooperation among Nations: Strengths and Weaknesses," *World Politic* 44 (April 1992), hlm. 467-468

<sup>9</sup>Helen Milner, *Op.cit.*, hlm. 468

---

<sup>10</sup>Kontan.co.id, "Sengketa Dagang Minyak Sawit RI-Uni Eropa," Februari 2020, <https://analisis.kontan.co.id/news/sengketa-dagang-minyak-sawit-ri-uni-eropa>

kucuran pinjaman dari bank. Panen kelapa sawit secara rutin dua minggu sekali berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi petani, sehingga daya tarik ini secara langsung memicu perluasan perkebunan kelapa sawit skala individu.<sup>11</sup>

Atas dasar kenyataan itulah, Indonesia kemudian merespon kebijakan diskriminatif Eropa dengan menetapkan standar keberlanjutan dalam pengelolaan dan produksi CPO sebagaimana yang tertuang dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil*. ISPO adalah seperangkat aturan wajib yang harus dilakukan oleh industri maupun petani CPO dalam upaya pengelolaan kelapa sawit yang bersifat berkelanjutan. ISPO adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan turut berpartisipasi dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap isu-isu lingkungan.<sup>12</sup>

ISPO pertama kali dikeluarkan regulasinya pada tahun 2011 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Aturan ini kemudian diperbarui pada tahun 2015 oleh Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit yang kemudian diperbarui kembali pada 2020 dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Denada Faraswacyen L. Gaol, *Op.cit*, hlm. 37

<sup>12</sup> Annisa Khairani Siregar, *Op.cit*, hlm. 54

<sup>13</sup> Madani, "Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia," Maret 2021, <https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/18/peraturan-menteri-pertanian-no38-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-sertifikasi-perkebunan-sawit-berkelanjutan-indonesia>

Sertifikasi ini harus terus disuarakan tidak hanya bagi industri dalam negeri tetapi juga lebih proaktif ke pasar internasional terutama Eropa. Selain promosi, sertifikat ISPO juga dapat dijadikan salah satu alat diplomasi perdagangan minyak sawit Indonesia. Pernyataan bahwa "minyak sawit adalah satu-satunya komoditas pertanian dunia yang memiliki sistem tata kelola dan sertifikasi berkelanjutan saat ini" adalah pernyataan yang harusnya terus menerus dipromosikan di pasar internasional untuk melawan kampanye negatif yang selama ini ditujukan kepada industri sawit Indonesia.<sup>14</sup>

Secara umum, pedoman sertifikasi ISPO didasari pada 4 aspek utama, yaitu kepatuhan terhadap hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial yang dirumuskan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan;
2. Penerapan pedoman teknis budi daya dan pengolahan kelapa sawit;
3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. Tanggungjawab terhadap pekerja;
5. Tanggungjawab sosial dan komunitas;
6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat;
7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Sertifikasi ISPO tersebut merupakan salah satu bukti perbaikan serius dan terfokus dari implementasi kebijakan tata kelola perkebunan sawit berkelanjutan. Terlepas dari bagaimana implementasi teknisnya, paling tidak perusahaan-perusahaan termasuk petani Indonesia sudah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tata kelola industri CPO berkelanjutan telah dimulai dan berjalan pada jalur yang diharapkan. ISPO

---

<sup>14</sup>Denada Faraswacyen L. Gaol, *Op.cit*, hlm. 41

<sup>15</sup> Annisa Khairani Siregar, *Op.cit*, hlm. 56

juga membuktikan bahwa kampanye hitam yang digaungkan oleh Uni Eropa tidaklah benar. Karena lahan sawit yang sudah bersertifikasi ISPO adalah lahan perkebunan yang tidak berada di kawasan hutan lindung dan tata kelola yang diterapkan sudah sesuai dengan perizinan yang ada.

ISPO memiliki fungsi ganda. Selain bertujuan meningkatkan daya saing global bagi industri kelapa sawit Indonesia melalui serangkaian arahan dan peraturan pemerintah, ISPO juga merumuskan standar nasional untuk praktik berkelanjutan perusahaan kelapa sawit Indonesia. ISPO mencakup 100 peraturan pemerintah pusat dan daerah yang ketat, mulai dari pengelolaan lingkungan, praktik ketenagakerjaan, aspek legalitas, hingga kesehatan dan keselamatan, serta praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan perkebunan.<sup>16</sup>

Komisi ISPO dipimpin oleh Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, dan melibatkan para pejabat senior dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja, Badan Pertanahan Nasional, serta lembaga-lembaga ekonomi di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Komisi ini mengeluarkan sertifikat ISPO bagi perusahaan-perusahaan Indonesia yang memenuhi persyaratan ISPO.<sup>17</sup>

Pada akhirnya, terlaksananya ISPO ini bermuara pada kepentingan nasional Indonesia agar mampu memenuhi tuntutan global terhadap produk minyak sawit yang berkelanjutan. Dengan begitu, negara-negara Eropa tidak punya alasan lagi untuk menolak CPO Indonesia yang sebelumnya dinilai tidak ramah lingkungan. Pada akhirnya, ISPO telah berkontribusi untuk mendorong usaha

perkebunan untuk mematuhi semua peraturan pemerintah, meningkatkan kesadaran pengusaha kelapa sawit untuk memperbaiki lingkungan dan melaksanakan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing.

### **Pembentukan Komisi Ekonomi Bilateral Indonesia-Belanda**

Implementasi ISPO nyatanya masih jauh dari target yang diharapkan, tidak hanya menghadapi tantangan dari luar, implementasi ISPO juga dinilai lambat dan terkesan tanpa persiapan dan perencanaan yang cukup. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perkebunan sawit yang sudah mendapatkan sertifikasi berkelanjutan atau ISPO. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian per Agustus 2017, tercatat bahwa jumlah perkebunan sawit yang telah mengantongi sertifikasi ISPO sebanyak 306 perusahaan, satu koperasi petani swadaya, dan satu kelompok petani plasma. Jumlah ini tetunya masih sangat jauh dari target pemerintah, karena angka yang terdaftar sertifikasi ini hanya setara dengan 16,7 persen dari luas kebun sawit nasional (11,9 juta hektar) atau 8,1 juta ton minyak sawit (dari 35 juta ton minyak sawit nasional).<sup>18</sup> Lambannya realisasi pengembangan minyak sawit berkelanjutan ini menjadi permasalahan baru yang harus dihadapi. Padahal, sertifikasi ini mulai diberlakukan sejak tahun 2011, atau dengan kata lain, selama enam tahun pelaksanaannya jumlah perkebunan sawit yang mendapatkan sertifikasi bahkan tidak mencapai 20 persen.

Penerapan sertifikasi ISPO ini merupakan langkah kongkrit Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah berharap kebijakan ini membuat produk CPO Indonesia akan lebih diterima dan berdaya saing di pasar global. Disisi lain, semakin baiknya

<sup>16</sup> Smart Tbk, "Sertifikasi ISPO-menuju kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia," September 2016, <https://www.smart-tbk.com/sertifikasi-ispo-menuju-kelapa-sawit-berkelanjutan-di-indonesia/>

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Denada Faraswacyen L. Gaol, *Op.cit*, hlm. 41

pengelolaan industri sawit juga diharapkan mampu berkontribusi terhadap upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Namun demikian, implementasinya tidak mudah karena tingkat kesiapan dari kelompok pekebun yang masih sangat rendah.

Salah satu permasalahan yang sangat mencolok dari implementasi sertifikasi ISPO ini adalah status lahan. Seperti diketahui bahwa salah satu syarat permohonan sertifikasi ISPO adalah hak atas tanah. Namun fakta membuktikan bahwa selama ini pekebun swadaya sangat sulit memperoleh hak atas tanah karena lahan perkebunan sawit mereka berada di kawasan hutan. Perkebunan sawit rakyat yang dibangun di kawasan hutan tanpa didahului penerbitan surat keputusan pelepasan kawasan hutan oleh menteri LHK sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan hak atas tanah. Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2018 lebih dari 4 juta ha atau setara 70 persen dari seluruh lahan kebun sawit rakyat belum memiliki sertifikat hak atas tanah. Dengan demikian akan sangat sulit mengharapkan pelaksanaan sertifikasi ISPO dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila permasalahan status lahan ini belum diselesaikan.<sup>19</sup>

Permasalahan implementasi inilah yang menjadi fokus kerja sama antara Indonesia dan Belanda. Belanda merupakan salah satu anggota Uni Eropa yang menolak adanya pelarangan minyak kelapa sawit masuk ke Eropa. Belanda justru berpandangan perlunya meningkatkan dialog dan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara produsen minyak kelapa sawit untuk mengentaskan permasalahan yang menjadi perhatian, bukan justru menghentikan produksinya. Inilah yang kemudian mendasari disepakatinya perjanjian (MoU) *Joint Production on Sustainable Palm Oil* antara Indonesia dan Belanda. Tujuan dari kerja

<sup>19</sup> Purwanto E, "ISPO Baru: Harapan Baru Bagi Penguatan Tata Kelola Sawit?", *Info Brief* (Oktober 2020), Tropenbos Indonesia, hlm. 4

sama ini adalah untuk mendukung upaya penguatan kapasitas petani skala kecil Indonesia dalam memenuhi sertifikasi ISPO guna memenuhi standari keberlanjutan.<sup>20</sup>

Kerja sama ini juga didasari fakta bahwa Belanda memiliki kepentingan atas minyak sawit Indonesia. Hal ini karena faktanya Belanda adalah importir CPO terbesar di Eropa. Produk yang diimpor oleh Belanda ini kemudian diolah kembali sebagai bahan baku pembuatan minyak nabati dan biodiesel. Belanda tercatat mendominasi konsumsi CPO di kawasan dengan menguasai rata-rata 75% pangsa pasar Uni Eropa setiap tahunnya, hal ini yang pada akhirnya menjadikan Belanda sebagai negara tujuan ekspor terbesar ketiga Indonesia di dunia, atau bahkan yang terbesar di Eropa.<sup>21</sup>

Atas dasar adanya kesamaan kepentingan itulah sehingga terjalinnya kerja sama Indonesia dan Belanda dalam kerangka perjanjian *Joint Production on Sustainable Palm Oil*. Tindak lanjut dari MoU tersebut kemudian Indonesia-Belanda sepakat membentuk Komisi Ekonomi Bilateral (*Bilateral Economic Commission*) sebagai wadah dialog guna melakukan pengatur-an teknis terkait kelanjutan kerja samanya. Hal itu pun disampaikan dalam dialog *National Initiatives for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders* (NISCOPS). Ada tiga poin utama dari kegiatan tersebut. Pertama berfokus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia dengan penerapan diversifikasi usaha, akses ke pasar global, serta memfasilitasi sertifikasi ISPO dan pendampingan untuk meningkatkan hasil produksi. Kedua, peningkatan kapasitas

<sup>20</sup> *Bisnis.com*, "Indonesia dan Belanda Kembali Teken Kerja Sama Terkait Kelapa Sawit," November 2021 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211109/9/1464105/indonesia-dan-belanda-kembali-teken-kerja-sama-terkait-kelapa-sawit>

<sup>21</sup> Fahriadi, *Op.cit*, hlm. 1766

petani rakyat kelapa sawit dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Ketiga, meningkatkan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim melalui reforestasi dengan *agroforestry* dan skema *replanting*.<sup>22</sup>

Jutaan petani kecil dan pekerja menggantungkan pencaharian mereka di sektor kelapa sawit, sektor yang secara signifikan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, lapangan kerja, dan neraca perdagangan di banyak negara produsen. Ekspansi global sektor ini dikaitkan dengan tantangan keberlanjutan yang akhir-akhir ini meningkat secara signifikan. Dampak minyak sawit terhadap perubahan penggunaan lahan dan emisi gas rumah kaca menimbulkan ketegangan antara negara pengekspor dan pengimpor. Ketegangan lebih lanjut dari perdebatan terhadap minyak sawit ini tidak menyelesaikan masalah. Namun dengan dukungan dari Pemerintah Belanda melalui skema NI-SCOPS sebagai bentuk kerja sama dengan pemerintah Indonesia, disamping juga dengan pemerintah Malaysia dan Nigeria, untuk mencapai tuntutan pasar dengan mengembangkan perkebunan sawit yang berkelanjutan.<sup>23</sup>

NI-SCOPS ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa sektor kelapa sawit dapat berkontribusi terhadap ambisi iklim SDGs dan Perjanjian Paris disamping juga meningkatkan mata pencaharian petani kecil dan pekerja. Area penghasil minyak sawit akan menjadi lebih kuat secara ekonomi dan sosial, sekaligus melindungi dan memulihkan sumber daya alam yang berhargayang mengarah pada pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor pertanian dan perubahan penggunaan lahan. NI-SCOPS akan memperkuat kemitraan yang ada dan membangun kemitraan baru dengan pemerintah pusat

dan daerah, melaporkan secara transparan kemajuan di setiap negara.<sup>24</sup>

Petani, perusahaan, dan pemerintah semuanya berkomitmen untuk berubah ke praktik yang lebih berkelanjutan guna memenuhi tuntutan pasar. Untuk itu, NI-SCOPS akan memfasilitasi, mendampingi serta memantau transisi ini, juga mendukung pendanaan pembangunan dan iklim nasional dan internasional untuk ditingkatkan mulai tahun 2022 dan seterusnya. NI-SCOPS menciptakan platform multi-stakeholder di tingkat provinsi atau kabupaten, di mana kesepakatan dicapai tentang pembangunan cerdas iklim: meningkatkan mata pencaharian dan pendapatan, meningkatkan ketahanan terhadap guncangan iklim, dan mengurangi emisi dari pertanian dan deforestasi.<sup>25</sup>

Dari paparan di atas tampak bahwa tujuan dari kerja sama Indonesia dan Belanda ini adalah untuk mengembalikan citra minyak sawit Indonesia dengan berupaya memenuhi standar keberlanjutan, ramah lingkungan, dan turut berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Fokus kerja sama ini adalah peningkatan kapasitas para petani yang menjadi aktor utama dalam produksi minyak sawit ini.

Minyak kelapa sawit menyumbang sekitar \$23 miliar AS per tahun terhadap pendapatan ekspor Indonesia. Petani kecil kelapa sawit di Indonesia mencakup sekitar 40% dari total area kelapa sawit dan akan memainkan peran penting dalam mewujudkan produksi minyak sawit berkelanjutan di Indonesia. MoU antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda yang ditandatangani pada September 2019 kemudian dilanjutkan dengan *Technical Arrangement* pada Maret 2020. Ada tiga indikator kinerja utama (*key performance*

---

<sup>22</sup> Bisnis.com, *Op.cit*

<sup>23</sup> IDH Sustainable Trade Initiative, "National Initiatives for Sustainable & Climate Smart Oil Palm Smallholders (NISCOPS)," <https://www.idhsustainabletrade.com/ni-scops/>

---

<sup>24</sup> Solidaridad, "What is NI-SCOPS?," Oktober 2020, <https://www.solidaridadnetwork.org/story/what-is-ni-scops/>

<sup>25</sup> Solidaridad, *Op.cit*

*indicator*) untuk mengukur keberhasilan kerja sama ini, yaitu:<sup>26</sup>

1. Meningkatkan mata pencaharian sekitar 38.000 petani kelapa sawit karena peningkatan hasil, peningkatan akses ke pasar dan kesiapan untuk mematuhi sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO);
2. Peningkatan adopsi praktik adaptif iklim oleh petani kecil kelapa sawit di lahan seluas 66.000 ha, melalui akses mudah ke informasi dan kebijakan/peraturan yang mendorong pertumbuhan hijau; dan
3. Meningkatkan upaya mitigasi iklim petani kelapa sawit skala kecil di 90.000 ha, melalui pengurangan perambahan di kawasan hutan, pencegahan deforestasi dan penerapan praktik pertanian cerdas iklim.

## KESIMPULAN

Industri minyak kelapa sawit memiliki peran penting sebagai penyumbang devisa negara dan pengurang angka pengangguran di Indonesia. Namun, Uni Eropa menerapkan kebijakan proteksionisme yang mengancam impor CPO ke Eropa karena persaingan dengan minyak nabati dari negara lain. Sebagai tanggapan, Indonesia berusaha menyesuaikan mekanisme produksi CPO dengan persyaratan berkelanjutan yang dituntut oleh Eropa. Kebijakan sertifikasi berkelanjutan (ISPO) diterapkan secara nasional untuk memastikan produksi CPO memenuhi standar yang diminta oleh Uni Eropa. Indonesia bekerja sama dengan Belanda dalam mengimplementasikan

kebijakan ini melalui nota kesepakatan (MoU). Kerja sama tersebut merupakan upaya Belanda untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya karena Indonesia sebagai negara sumber impor beberapa komoditas yang dibutuhkan oleh Belanda. Program National Initiatives for Sustainable and Climate Smart Oil Palm Smallholders didanai sepenuhnya oleh pemerintah Belanda dan bertujuan untuk mendampingi petani sawit skala kecil di Indonesia agar memenuhi standar keberlanjutan dalam praktiknya serta meningkatkan pengetahuan petani terkait perubahan lingkungan. Kesepakatan ini memiliki dua fokus utama. Pertama, membantu petani sawit skala kecil meningkatkan kualitas produksi dan memenuhi standar keberlanjutan. Kedua, meningkatkan pengetahuan petani agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Dengan kerangka kerja sama ini, Indonesia dapat tetap menjual CPO ke Eropa dan juga berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi karbon sesuai dengan semangat keberlanjutan global.

## Referensi

### Buku

Dugis, Vinsensio. Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. (Surabaya: Cakra Studi Global Strategi, 2016)

### Artikel Jurnal

Fahriadi, "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mempertahankan Ekspor Produk Sawit di Pasar Belanda Pasca Implementasi Kebijakan REACH Uni Eropa", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 6, Nomor 4 (2018): 1771-1776

Gaol, Denada Faraswacyen L. "Faktor Penghambat Diplomasi CPO Indonesia di Pasar Eropa," *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 2, No. 2 (2018): 38-50

---

<sup>26</sup>Solidaridad, "NI-SCOPS: National Initiative to stimulate and scale up smallholder climate-smart agriculture in oil palm landscapes in Asia and Africa: NI-SCOPS in Indonesia," <https://www.solidaridadnetwork.org/wp-content/uploads/2021/11/About-NI-SCOPS-Indonesia.pdf>

Milner, Helen. "International Theories of Cooperation among Nations: Strengths and Weaknesses," *World Politic* 44 (April 1992): 466-496

Olivia, Yessi. "Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional", *Jurnal Transnasional* vol. 5, no. 1 (Juli 2013): 896-774

Purwanto E, "ISPO Baru: Harapan Baru Bagi Penguatan Tata Kelola Sawit?", *Info Brief* (Oktober 2020), Tropenbos Indonesia

### **Artikel dan Media Online**

Bisnis.com, "Indonesia dan Belanda Kembali Teken Kerja Sama Terkait Kelapa Sawit," November 2021 <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211109/9/1464105/indonesia-dan-belanda-kembali-teken-kerja-sama-terkait-kelapa-sawit>

Bisnis.com, "Indonesia dan Belanda Teken Kerja Sama Sawit Berkelanjutan," September 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190927/12/1153106/indonesia-dan-belanda-teken-kerja-sama-sawit-berkelanjutan>

Databoks.katadata.co.id, "Ekspor Minyak Sawit ke Eropa Januari-September 2019 Menyusut 12%", November 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/06/ekspor-minyak-sawit-ke-eropa-januari-september-2019-menyusut-12>

Indonesia-Investment, "Minyak Kelapa Sawit," Juni 2017, <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>

Kontan.co.id, "Sengketa Dagang Minyak Sawit RI-Uni Eropa," Februari 2020, <https://analisis.kontan.co.id/news/sengketa-dagang-minyak-sawit-ri-uni-eropa>

Liputan6.com, "Belanda Bakal Bantu Upaya Sertifikasi Sawit Indonesia

untuk Ekspor ke Pasar Eropa", Oktober 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/4081076/belanda-bakal-bantu-upaya-sertifikasi-sawit-indonesia-untuk-ekspor-ke-pasar-eropa>

Madani, "Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia," Maret 2021, <https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/18/peraturan-menteri-pertanian-no38-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-sertifikasi-perkebunan-sawit-berkelanjutan-indonesia>

Smart tbk, "Sertifikasi ISPO-menuju kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia," September 2016, <https://www.smart-tbk.com/sertifikasi-ispo-menuju-kelapa-sawit-berkelanjutan-di-indonesia/>

### **Website**

IDH Sustainable Trade Initiative, "National Initiatives for Sustainable & Climate Smart Oil Palm Smallholders (NISCOPS)," <https://www.idhsustainabletrade.com/niscoops/>

Solidaridad, "What is NI-SCOPS?," Oktober 2020, <https://www.solidaridadnetwork.org/story/what-is-ni-scops/>

### **Skripsi dan Tesis**

Annisa Khairani Siregar, "Diplomasi Indonesia Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Uni Eropa Terhadap Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia," Skripsi, Universitas Sumatera Utara